



Anggaran Pendidikan Naik 30 Persen

■ Yulianingsih

Dari anggaran sebesar itu, Rp 34 miliar digunakan untuk anggaran BOP dan Rp 34 miliar untuk JPD. Pada 2013 lalu, anggaran JPD sebesar Rp 32 miliar dan BOP Rp 19 miliar.

YOGYAKARTA — Anggaran untuk pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat menengah (SMA/SMK) di Yogyakarta pada 2014, diusulkan naik 30 persen. Hal berdasarkan pertimbangan, kegiatan bidang pendidikan yang di-cover melalui APBD 2014 ini, juga diusulkan naik 30 persen dari Rp 51 miliar pada 2013, menjadi Rp 68 miliar.

"Ini sudah kita usulkan, mudah-mudahan disetujui di rapat anggaran dewan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Jumat (20/12).

Kenaikan anggaran pendidikan tersebut, menurutnya, antara lain karena adanya kenaikan anggaran untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di sekolah negeri dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) bagi siswa miskin. Selain itu pembayaran tunggakan pelunasan bagi siswa yang tidak bisa mengambil ijazah juga dianggarkan naik.

Dari anggaran sebesar itu, kata Edy, Rp 34 miliar digunakan untuk anggaran BOP dan Rp 34 miliar untuk JPD. Pada 2013 lalu, anggaran JPD sebesar Rp 32 miliar dan BOP Rp 19 miliar.

"Dengan kenaikan anggaran BOP yang signifikan ini, dana yang ditarik dari masyarakat melalui sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) hanya tinggal sedikit. Bahkan untuk siswa miskin, bisa gratis sama sekali karena tanggungan SPP dibiayai melalui JPD," jelasnya.

Dengan besaran BOP tersebut maka dana SPP yang ditarik dari masyarakat untuk siswa SMA hanya Rp 40 ribu per bulan dan SMK Rp 80 ribu per bulan. Sedangkan siswa SMP dan SD sudah gratis. "Kalau di sekolah swasta, sebenarnya juga ada BOS swasta. Tapi memang tidak banyak," katanya.

Dia mengakui, pihaknya memang belum bisa menerapkan pendidikan gratis dari TK hingga SMA di Kota Yogyakarta. Namun dengan kenaikan BOP, ke depan hal ini bisa dilaksanakan. "Jika pada tahun 2015 BOP bisa naik lagi, maka bisa saja sekolah gratis tersebut diterapkan mulai tahun itu," katanya.

Namun, kata dia, hal itu masih dalam tahap pengkajian. Pasalnya dibutuhkan aturan yang jelas

terkait pelaksanaan pendidikan gratis.

Untuk itu, meski pada tahun ini anggaran BOP mengalami kenaikan cukup signifikan, tidak menutup kemungkinan adanya penarikan dana dari masyarakat untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun dia menegaskan, hal itu harus melalui musyawarah dengan orang tua/wali murid. "Kalau masyarakat mau berpartisipasi ya silakan, kalau tidak ya tidak masalah," katanya.

Sementara Sekretaris UPT JPD Kota Yogyakarta Agus Trimadi mengatakan dengan dana JPD sebesar Rp 34 miliar, masih belum bisa dipastikan berapa siswa yang di-cover oleh program ini. Pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi jumlah masyarakat pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) atau kartu miskin dari Dinas sosial setempat.

"Kita akan menggunakan data terbaru dari Dinas Sosial. Jadi berapa siswa miskin yang akan di-cover, kami masih belum tahu," katanya.

Namun, kata dia, dana JPD tahun 2014 naik karena anggaran untuk pelunasan tunggakan biaya sekolah siswa miskin naik. "Usulan pelunasan tunggakan biaya pendidikan pada 2013 naik, sehingga kita usulkan 2014 juga naik," katanya. ■ ed: eko.widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005